

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan didalam BAB sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan pelayanan izin usaha perdagangan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman (KP2TPM) berpedoman kepada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Ada beberapa Pasal yang telah diperbarui oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan akan tetapi KP2TPM Kota Pariaman belum memperbarui sepenuhnya ketentuan yang telah diubah tersebut.
2. Mekanisme pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman (KP2TPM) didasarkan pada keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kemudian

diwujudkan oleh pemerintah Kota Pariaman dengan membentuk KP2TPM dan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman. KP2TPM diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin yang telah dilimpahkan oleh pemerintah Kota Pariaman. Menurut penulis mekanisme pelayanan izin usaha perdagangan yang dilakukan oleh petugas KP2TPM sudah sesuai dengan prosedur atau SOP yang telah ditetapkan KP2TPM Kota Pariaman serta pelayanan yang diberikan juga sudah cukup baik sesuai dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, namun belum memenuhi suatu pelayanan publik yang prima sehingga menyebabkan kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan KP2TPM Kota Pariaman belum terpenuhi. Penulis sangat berharap agar KP2TPM Kota Pariaman dapat meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat memancing keinginan masyarakat untuk mengurus izin usaha perdagangan.

B. SARAN

1. Pemerintah dan petugas KP2TPM Kota Pariaman perlu membuat peraturan yang mengatur pelayanan izin usaha perdagangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Pariaman.
2. Petugas KP2TPM Kota Pariaman seharusnya dapat menciptakan rasa nyaman, aman, dan kepastian hukum kepada masyarakat atau

pemohon izin sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan dari pelayanan perizinan KP2TPM Kota Pariaman dan adanya pandangan positif dari masyarakat terhadap KP2TPM Kota Pariaman.

3. Suatu pelayanan publik dikatakan sebagai suatu pelayanan publik yang prima adalah dimana pelayanan tersebut dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelayanan publik sehingga dapat memberikan kepuasan publik atas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini perlu dilakukan karena peran Pemerintah yang terlalu dominan tidak selamanya menghasilkan pelayanan publik yang prima. Dengan adanya ruang yang cukup bagi Pemerintah atau petugas KP2TPM Kota Pariaman dan publik untuk bersama-sama melakukan kolaborasi dalam pelayanan publik, diharapkan dapat menciptakan kepuasan bagi kedua belah pihak.
4. Memberikan sanksi bagi petugas KP2TPM Kota Pariaman yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya. Contohnya adanya sanksi berupa permohonan maaf yang disampaikan langsung secara tertulis oleh petugas KP2TPM Kota Pariaman kepada pemohon izin dalam hal keterlambatan penerbitan izin.
5. Memperbaiki atau menambah sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan perizinan.
6. Melakukan survey setiap tahunnya terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan perizinan KP2TPM Kota Pariaman.